

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di dalam suatu lembaga di pemerintahan pastinya tidak lari jauh dari adanya Laporan keuangan. Laporan keuangan berguna bagi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan kinerja keuangannya kepada khalayak publik. Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dijelaskan bahwa yang disebut laporan keuangan berkualitas itu memenuhi karakteristik yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (PP No. 71 Tahun 2010).

SAP berisikan prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan yang diterapkan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah. SAP dapat di terapkan di lingkup pemerintahan baik di pemerintah pusat maupun di pemerintahan daerah. Penerapan SAP akan berpengaruh terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan di pemerintah pusat maupun daerah.

Menyajikan informasi mengenai realisasi anggaran posisi keuangan, kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan dan arus kas merupakan tujuan umum laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah dihasilkan dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) yang kemudian dijadikan dasar dalam membuat laporan keuangan Pemerintah. Tujuan umum laporan keuangan sektor publik menurut Mardiasmo (2009:161) adalah akuntabilitas, kepatuhan dan pengelolaan, perencanaan dan informasi otorisasi, dan pelaporan retrospektif, hubungan masyarakat dan gambaran dan kelangsungan organisasi . wewenang yang dilimpahkan kepada pelaksanaan tanggungjawab pengelola organisasi laporan keuangan yang berkualitas harus menunjukkan bahwa kepala daerah bertanggungjawab. Kewajiban pemerintah untuk membuat laporan keuangan sebagai alat evaluasi kerja, pengendalian, sebagai salah satu tanggung jawan dan sebagai dasar pengambilan keputusan. Sebab itu harus dibuat oleh pemerintah secara berkualitas agar para pemakai laporan keuangan dapat memahami informasi yang terkandung dalam laporan keuangan tersebut. sebab jika laporan keuangan pemerintah todak baik dapat menimbulkan implikasi yang buruk, salah satunya yaitu menurunkan kepercayaan khalayak dalam pengelolaan dana publik (pemerintah) dan kualitas keputusan menjadi tidak baik. Kualitas dapat diartikan sebagai sesuaian dengan kadar ketidaksesuaian serta dicapai melalui pemeriksaan standard an diukur berbasis. Hakikat Laporan keuangan sektor publik merupakan suatu 3 bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya. Menurut Mohamad (2014) untuk menghasilkan laporan keuangan yang baik faaktor yang harus menjadi dasar pertimbangan adalah

kualitas SDM dan penerapan TI. Hampir semua birokrat yang bertanggungjawab pada OPD tidak memahami akuntansi. Karena kebanyakan disebabkan tidak paham akuntansi.

Pemerintah Daerah memerlukan adanya implementasi sebuah sistem aplikasi dalam pembuatan laporan keuangan dan mencanangkan reformasi di bidang akuntansi agar pengelolaan keuangan daerah tepat, akurat dan cepat. Salah satu reformasi yang dilakukan adalah keharusan penerapan akuntansi berbasis akrual pada setiap instansi pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah, yang dimulai tahun anggaran 2008. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 36 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: "Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13, 14, 15, dan 16 undang-undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas."

Pada tahun 2005, Presiden Susilo Bambang Yudoyono menetapkan PP Nomor 24 tentang SAP yang merupakan standar akuntansi pemerintahan pada masa transisi dari basis kas menuju basis akrual penuh. SAP mulai diberlakukan untuk penyusunan laporan

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD/APBN Thn Anggaran 2005. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, akuntansi pemerintahan menggunakan akuntansi berbasis kas menuju akrual, artinya menggunakan basis kas untuk pengakuan dari belanja, pendapatan, dan pembiayaan dalam LRA dan basis akrual untuk pengakuan kewajiban, aset, dan ekuitas di dalam Neraca.

Keberhasilan dari perubahan akuntansi pemerintahan dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan dan lebih akuntabel memerlukan banyak upaya dan banyak kerja sama dari berbagai pihak. kalau penerapan akuntansi berbasis kas menuju akrual saja masih banyak menghadapi hambatan, lebih lagi jika pemerintah akan menerapkan akuntansi berbasis akrual. Beberapa tantangan dalam implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual salah satunya adalah adanya penggunaan TI digunakan dan di andlakan dalam pelaporan keuangan yang di publikasikan oleh pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, iformasi itu harus bermanfaat bagi para pemakai sama dengan mengatakan bahwa informasi harus mempunyai nilai

Keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Hal tersebut telah diamanatkan oleh Undang-Undang No 1 tahun 2004 yang menyatakan “Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintah mengatur dan

menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh. SPI ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Untuk melaksanakan hal tersebut pada tahun 2008 telah terbit PP No 60 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Dikutip Dari berita Antara Jabar “permasalahan terkait beban penyusutan yang tersaji di LO, masalah penyajian dana BOS dan dana lainnya di luar APBD, kami harap akuntansi berbasis akrual ini dapat cepat di pahami oleh setiap pemerintah daerah, sehingga tidak ada permasalahan lagi” maka dari itu pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan TI untuk membangun jaringan SIM (system informasi Manajemen) dan proses kerja yang mungkin memungkinkan pemerintahan bekerja secara tepat dengan menyederhanakan akses antar unit kerja sehingga dapat meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan keuangan.

TI yang ada tidak atau belum mampu dimanfaatkan secara penuh maka implementasi teknologi menjadi tidak baik dan mahal. Kendala penerapan pemanfaatan TI antara lain berkaitan dengan kondisi perangkat lunak, perangkat keras, kondisi SDM yang ada, pemutakhiran data, dan keterbatasan dana. Dan ini menjadi kendala di OPD. Pemanfaatan TI yang optimal ini mungkin juga memiliki pengaruh

Terhadap ketepatanwaktuan dan keterandalan pelaporan keuangan pemerintah (Indriasari dan Naharyanto, 2008)

SDM yang dimiliki didukung adanya TI dan juga memiliki motivasi kerja yang maksimal dalam keinginan di bidang teknologi maupun pengetahuan tentang sistem yang baik diharapkan dapat membantu dalam pelaporan keuangan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang tepat waktu dan handal. Akan tetapi selain SDM dan TI ada hal lain yang harus diperhatikan yaitu SPI akuntansi yang berfungsi untuk mengatur prosedur pencatatan, teknik akuntansi seperti fungsi otorisasi untuk tujuan pengendalian intern, perubahan dalam pendekatan sistem akuntansi dan dokumen dan formulir yang digunakan, laporan serta pengawasan. Fungsi PI tersebut dapat membantu sumberdaya manusia untuk mengetahui batasan dan hak dalam bekerja serta TI seperti apa yang bisa dimanfaatkan untuk membantu pekerjaannya tersebut (Ariesta 2013). PI menurut Permendag No. 60 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian efektivitas dan tujuan pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundangundangan. Ada 3 fungsi yang terlihat dari definisi tersebut yaitu: (a) efisiensi dan efektivitas operasi, (b) keterandalan pelaporan keuangan, dan (c) kepatuhan terhadap ketentuan dan PP yang berlaku.

Fungsi pertama dilakukan untuk mencegah terjadinya inefisiensi dan dinamakan pengendalian intern akuntansi, sedangkan fungsi kedua dan ketiga dilakukan secara khusus untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dan dinamakan pengendalian intern administrative. Komponen penting dari PI organisasi yang terkait dengan sistem akuntansi antara lain (Mahmudi, 2008): (a) sistem dan prosedur akuntansi, (b) formulir, (c) pemisahan tugas dan (d) otorisasi, dokumen, dan catatan,.

SAP juga mengatur tentang laporan keuangan pemerintah untuk tujuan umum dalam upaya meningkatkan perbandingan LK yang tidak buruk terhadap entitas maupun anggaran antar periode. laporan keuangan daerah yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan keuangan merupakan tujuan umum . Penerapan SAP secara baik, akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tri wahyuni (2018) yang mengungkapkan bahwa efektifitas penerapan SAP berpengaruh positif terhadap KLK, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Arief (2016) tentang Pengaruh Penerapan SAP , Kompetensi SDM , Pemanfaatan TI Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah medan, tetapi penerapan SAP, pemanfaatan TI dan SPI tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota medan.

Dapat tercapai atau terlaksana tepat pada waktunya merupakan Masalah yang penting untuk ditingkatkan, motivasi yang mendorong untuk menggerakkan seseorang agar sesuatu sesuai yang diharapkan. Motivasi adalah hal yang mendasar yang harus dipunyai oleh seseorang karena jika tidak ada motivasi untuk bekerja dan motivasi untuk mendapat sesuatu, maka membuat sulit untuk menyelesaikan ataupun mendapat sesuatu yang kita inginkan. (Haza, 2015) Motivasi adalah satu proses yang dimulai dari adanya kebutuhan yang menimbulkan suatu dorongan dengan maksud mencapai satu tujuan atau kekurangan psikologis. Lodhrakentjana (2012) dengan judul penelitian Motivasi, Kepuasan Kerja, Komitmen Pegawai Akuntansi dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kota Depok, menarik kesimpulan bahwa motivasi, kepuasan kerja dan komitmen berhubungan positif dan berpengaruh signifikan dengan kualitas laporan keuangan. Jumiartini (2015) dengan judul penelitian Pengaruh SPI Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kabupaten Bole Balango (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Bole Balango), dengan menarik kesimpulan SPI pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

SAP memerlukan PI atau dengan kata lain sistem akuntansi berkaitan erat dengan PI organisasi (Mahmudi, 2007). Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) menjalankan penelitian mengenai SPI pada SKPD boyolali, karanganyar, Surakarta, Sukoharjo, klaten, Sragen dan Klaten. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa SPI berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan Brendh Septo Nugroho (2018) yang berjudul pengaruh penerapan SAP, kompetensi SDM, SPI, pemanfaatan TI dan komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah boyolali yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern dan pemanfaatan TI tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Menurut Rogers (1986) “Teknologi informasi merupakan perangkat keras bersifat organisatoris dan meneruskan nilai-nilai sosial dengan siapa individu atau khalayak mengumpulkan, memproses, dan saling mempertukarkan informasi dengan individu atau khalayak lain.” Pendapat diatas menyebutkan bagaimana TI dapat memberikan andil dalam proses komunikasi individu secara tidak bertele tele, khususnya dalam berkomunikasi dengan individu lainnya

Pada penelitian Zuliarti (2012) menyatakan bahwa pemanfaatan TI berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Berbeda dengan Hasil penelitian Desi Puspitawati (2016) menunjukkan kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tetapi standar akuntansi pemerintah dan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

Penelitian ini adalah rekapitulasi dari penelitian yang diteliti oleh I Wayan Nico Setiawan, Gayatti (2017) dengan judul Pengaruh akuntansi berbasis akrual , SPI dan motivasi kerja pada kualitas laporan keuangan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu dengan adanya penggantian variabel akuntansi berbasis akrual dengan standar akuntansi pemerintah dan penambahan variable independen yaitu pemanfaatan teknologi informasi. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengetahui sampai sejauh mana pengelolaan keuangan di SKPD Kabupaten Semarang sehingga mengambil judul **“pengaruh sistem akuntansi pemerintah ,**

pengendalian intern, motivasi kerja dan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan”

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas terlihat ada keterkaitan antara variable independen Standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian intern dan motivasi kerja yang sejajar untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Sistem akuntansi pemerintah merupakan suatu sistem pemerintahan yang menghasilkan data yang lebih akurat untuk membuat laporan keuangan yang baik dan berkualitas. Sedangkan salah satu tujuan sistem pengendalian intern adalah untuk mengecek keandalan dan ketelitian data dari akuntansi. Resiko terjadinya kesalahan dan kekeliruan perhitungan atau pencatatan dapat dimamipulasi sehingga meminimalkan kemungkinan pemerintah membuat kekeliruan. Hal ini tentunya tidak akan terlaksana jika tanpa adanya motivasi dari atasan atau pun bawahan yang bekerja untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Motivasi dirumuskan sebagai perilaku yang ditunjukkan pada sasaran. Motivasi berkaitan dengan tingkat usaha yang dilakukan untuk mengejar suatu tujuan. Sehingga dapat diketahui bahwa akuntansi berbasis akrual, sistem pengendalian intern, dan motivasi kerja memiliki peran penting dalam peningkatan kualitas laporan keuangan. TI juga sangat berpengaruh dengan kualitas laporan keuangan karena merupakan efisiensi dalam membuat laporan keuangan

Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian intern, motivasi kerja dan pemanfaatan teknologi informasi pada kualitas laporan keuangan. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka di peroleh rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan?
2. Bagaimana pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan?
3. Bagaimana pengaruh motivasi kerja terhadap kualitas laporan keuangan ?
4. Bagaimana pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan?

1.3 Tujuan penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan
2. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan
3. Untuk menganalisis bagaimana motivasi kerja terhadap kualitas laporan keuangan
4. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan

1.4 Manfaat penelitian

a. Bagi penulis

Sebagai sarana untuk penerapan teori dan tambahan pengetahuan yang diperoleh berkaitan dengan standar akuntansi pemerintah, pengendalian intern, motivasi kerja dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan

b. Bagi akademisi

Sebagai tambahan literatur mengenai pengujian SAP, pengendalian intern, motivasi kerja dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan

c. Bagi dinas di Kab. Semarang

Sebagai acuan dan literatur yang diharapkan dapat menjadi informasi untuk meningkatkan dan mempermudah mengerjakan laporan keuangan sehingga menjadi laporan keuangan yang baik